Implementasi Manajemen Kurikulum 2013 dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Kapuk Muara 01, Penjaringan, Jakarta Utara)

Muh. Sufyan Hadi
Universitas PTIQ Jakarta
E-mail: muhsufyanhadi92@gmail.com

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 15 Januari 2025
Accepted: 17 Januari 2025

Keywords: *Pendidikan, Kurikulum 2013, Manajemen.*

Abstrak: *Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk berkembang,menambah wawasan, kecerdasan dan pengalaman. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Implementasi manajemen pendidikan agama Islam di sekolah dasar melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum 2013. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis data menggunakan metode analisis intaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen pendidikan agama islam pada kurikulum sudah baik. Implementasi manajemen pendidikan agama Islam dimulai dengan perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha yang dilakukan oleh setiap individu untuk berkembang, menambah pengetahuan, kecerdasan, dan pengalaman. Pendidikan berperan penting bagi masyarakat, agama, dan negara. Sebagai langkah awal yang berkelanjutan, pendidikan menentukan arah dan langkah kesuksesan seseorang di masa depan. Pendidikan pada hakikatnya adalah upaya untuk mempersiapkan generasi penerus dalam menghadapi tantangan masa depan. Selain itu, pendidikan juga menjadi salah satu elemen penting dalam membangun dan membina masyarakat (Abidin, 1975). Pendidikan adalah proses jangka panjang yang bertujuan membentuk manusia menjadi pribadi dengan kekuatan intelektual dan spiritual, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup di berbagai aspek (Wijdan, 1997) . Menurut UNESCO, terdapat empat pilar utama dalam pendidikan yang harus diterapkan: belajar untuk mengetahui, belajar untuk melakukan, belajar untuk menjadi mandiri, dan belajar untuk hidup bersama. (Unesco, 2000). Melalui proses pendidikan, kita dapat memperoleh pengetahuan, membentuk pribadi yang beradab, bermoral, dan beretika. Pendidikan juga memperkaya pengalaman serta nilai-nilai praktis yang dapat diaplikasikan untuk kepentingan masyarakat.

Di Indonesia, pendidikan nasional hadir sebagai wujud sistem pendidikan yang merefleksikan pranata sosial yang berwibawa dan kokoh, bertujuan untuk memberdayakan seluruh warga negara agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas. Sistem pendidikan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, mendefinisikan pendidikan sebagai upaya untuk mencetak individu yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab (Safrudianur, 2014).

United Nations Development Program mencatat bahwa pada tahun 2007, Indonesia menempati peringkat ke-107 dari 177 negara dengan indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 0,728. Di tingkat ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-7 dari 9 negara (Laliatussadah, 2015) . Data terbaru tahun 2019 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia dengan IPM mencapai 71,92, meningkat sebesar 0,53 poin atau tumbuh 0,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, survei yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultant* dan UNESCO, pada tahun 2012 kualitas pendidikan Indonesia berada di peringkat ke-12 di Asia. Selain itu, UNESCO melaporkan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 120 negara berdasarkan *Education Development Index* (Indeks Pembangunan Pendidikan) (BPS, 2020) . Pendidikan sebagai cara untuk meningkatkan kualitas dan pribadi hidup manusia dalam segala aspek kehidupuan manusia di lingkungannya.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Bidang Sipil dan Partisipasi Anak, Jasa Putra, menyatakan bahwa KPAI mencatat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu 9 tahun, dari 2011 hingga 2019. Dari jumlah tersebut, 2.473 laporan terkait bullying, baik di pendidikan maupun media sosial, dengan tren yang terus meningkat. Serangkaian kasus dan data di atas menggambarkan adanya ketidakjelasan dalam pengelolaan fungsi manajemen di sekolah. Masalah ini berdampak pada terpinggirkannya pendidikan agama Islam di sekolah dan kegagalan implementasi Kurikulum 2013 dalam meningkatkan sikap peserta didik (KPAI, n.d.).

Kurikulum 2013 sudah diberlakukan sebagai kurikulum nasional dalam setiap jenjang pendidikan. Kurikulum 2013 dikembangkan dan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang semua itu tertuang pada Sisdiknas pasal 3 yang menjelaskan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak pribadi serta peradaban dengan bangsa untuk bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara secara demokratis serta bertanggung jawab. Namun kenyataannya rendahnya moralitas pada generasi ini membuat tidak berhasilnya fungsi-fungsi manajemen dalam pendidikan untuk implementasi kurikulum pada lembaga pendidikan.

Pendidikan memiliki kekuatan spiritual keagamaan yang dapat membantu seseorang memahami nilai-nilai spiritual melalui pendidikan agama, khususnya dalam konteks keislaman. Pendidikan agama merupakan salah satu mata pelajaran di instansi pendidikan, SD, SLTP, SLTA maupun perguruan tinggi. Undang-Undang sistem pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 Pasal 12 ayat 1 butir a yang menuliskan bahwa, “Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan agama sesuai dengan agama yang yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. Pendidikan Agama Islam adalah bentuk upaya yang dilakukan oleh manusia dengan tanggung jawab untuk membina, membimbing, dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki, agar individu dapat berperan sesuai dengan fungsi dan tujuan penciptaannya (Shunhaji, 2019).

Penelitian ini menjadi penting karena terdapat fenomena sebelumnya, dan diperlukan penelitan serta bukti empiris mengenai Implementasi manajemen dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dasar melalui mata pelajaran pendidikan agama Islam pada kurikulum 2013. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi manajemen pendidikan agama Islam di sekolah dasar melalui mata pelajaran pendidikan agama

Islam pada kurikulum 2013.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus (J.R, 2010) . Pendekatan studi kasus bertujuan memberikan gambaran tentang kejadian yang terjadi di lokasi penelitian, berdasarkan fenomena yang berkembang saat ini (Hartati, 2020) . Metode pengumpulan datan menggunakan wawancara dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini menngunakan data primer primer dan skunder (Sugiyono, 2019) . Analisis data menggunakan metode analisis intaktif, yang memiliki tiga komponen yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kurikulum 2013

Manajemen memiliki berbagai fungsi dalam pendidikan, yaitu sebagai perencanaan gagasan dan ide, pengorganisasian pembagian tugas, pelaksanaan melalui program dan aktivitas, serta pengawasan dan evaluasi kegiatan pembelajaran. Dalam kaitannya dengan implementasi Kurikulum 2013 di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, serangkaian aktivitas, tata cara, dan fungsi manajemen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. **Perencanaan**

Perencanaan dalam dunia pendidikan merupakan upaya untuk memproyeksikan masa depan dalam menentukan prioritas, termasuk pembiayaan pendidikan, dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan politik guna mencapai potensi pendidikan secara nasional (Kasmawati, 2019) . Perencanaan pada pendidikan memiliki 3 jenis, diantaranya:

1) Perencanaan pencapaian program pendidikan nasional yaitu, serangkaian proses usaha layanan pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah pusat.
2) Perencanaan pencapaian progam pendidikan regional yaitu, perencanaan pendidikan yang dibuat dan diberlakukan dalam wilayah regional, layanan pendidikan tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
3) Perencanaan pencapaian program pendidikan kelembagaan yaitu, perencanaan pendidikan mencakup institusi atau lembaga pendidikan tertentu.

Fungsi manajemen dalam perencanaan pengimplementasian kurikulum 2013 memiliki beberapa tujuan yaitu:

1) Sebagai standar pengawas pada pelaksanaan dan perencanaan.
2) Kejelasan mengenai kapan pelaksanaan dan selesai kegiatanya.
3) Kejelasan akan pengetahuan pada siapa saja yang terlibat baik secara kualifikasi maupun kuantitas.
4) Memberikan kegitan yang sistematis dan terarah pada biaya dan kualitas kerjaan.
5) Menimimalkan berbagai proses kegiatan aktivitas tidak menghasilkan untuk penghematan biaya, tenaga dan kegiatan.
6) Pemberian gambaran keseluruhan mengenai kegiatan perkerjaan.
7) Penyelarasan dan perpaduan beberapa bagian sub kegiatan.

Bentuk implementasi perencanaan manajemen dalam kurikulum 2013 adalah memberikan status kejelasan mengenai profil sekolah jenjang, menerapkan sebuah pedoman dalam perencanaan pendidikan dengan memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan sekolah

seperti melakukan tindakan pengangaran ekonomi sebagai pendukung kelengkapan sarana prasarana baik bentuk, uang atau ketersedian bangunan, ruangan, buku dan alat-alat lainnya dan melakukan tindakan pembentukan visi dan misi yang mengandung nilai-nilai fokus pada pencapaian kurikulum 2013 yaitu, pada ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan, yang selanjutnya dijadikan fokus pengembangan pada peserta didik dalam bentuk pembelajaran baik bentuknya proses pendidikannya ektrakurikuler dan intrakurikuler, sumber daya pendidik dengan kata lain tersedianya guru sebagai pelaksana pendidikan dan inidvidu pelaksana implementasi kurikulum 2013, memiliki kualifikasi sarjana agama Islam serta harus memiliki sifat yang inovatif dan kreatif sesuai dengan visi dan misi serta fokus dalam pengembangan peserta didik di sekolah maupun secara Nasional.

b. **Pengorgaisasian**

Fungsi manajemen dalam pengorganisasian untuk mengimplementasikan Kurikulum 2013 didasarkan pada peraturan dan ketentuan yang berlaku. Pedoman ini dijalankan oleh seluruh personel sekolah sesuai dengan aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang mencakup berbagai aspek rencana kerja sekolah terkait Kurikulum 2013 yakni:

1) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 kerangka dasar dan struktur Kurikulum 2013 SD/MI. Struktur kurikulum adalah juga merupakan aplikasi konsep pengorganisasian konten dalam sistem belajar dan pengorganisasian beban belajar dalam sistem pembelajaran.
2) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Tahun 2014 muatan lokal kuriulum 2013. Muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman perserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya. Dengan kata lain Perkemdibud Nomor 79 Tahun 2014 digunakan sebagai acuan dan landasan dalam pembuatan rencana kerja sekolah.
3) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Standar Kompetensi Lulusan. Perkemdibud Nomor 20 Tahun 2016 digunakan sebagai acuan dan landasan dalam perencanaan kerja sekolah hal penentuan ketuntasan belajar di sekolah.
4) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 berisikan mengenai standar isi pendidikan dasar dan menengah. Perkemdibud Nomor 21 Tahun 2016 menjadikan sebuah landasan dalam rencana kerja sekolah untuk strategi pembelajaran dan menentukan kriteria ketuntasan minimal dalam mencapai ketuntasan belajar.
5) Peraturan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 mengenai hal standar proses pendidikan dasar dan menengah. Terkait dengan proses pendidikan dasar pada jenjang pendidikan dasar maka dikembangkan beberapa standar yang digunakan mencakup, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran. Berkaitan dengan peraturan Perkemdibud Nomor 22 Tahun 2016 digunakan sebagai strategi pembelajaran dan penyusunan RPP.
6) Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 mengenai beberapa standar penilaian ruang lingkup, pertujuan, pemanfaatan, prinsip, pemekanimean,

prosedur dan intrumen kriteria penilaian hasil belajar untuk para peserta didik. Perkemdibud Nomor 23 Tahun 2016 digunakan dalam rangka menilai kegiatan rencana kerja sekolah dalam hal pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah.

c. **Pelaksanaan**

Fungsi manajemen dalam pelaksanaan berkaitan dengan menjalankan berbagai kegiatan dan aktivitas dalam organisasi. Pelaksanaan pembelajaran di sekolah bagi peserta didik merupakan salah satu bentuk implementasi fungsi manajemen pelaksanaan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan Kurikulum 2013 (Suhana, 2009).

d. **Pengawasan**

Pengawasan atau ***controlling*** adalah kegiatan untuk mengawasi, mengukur, dan membandingkan pelaksanaan kegiatan organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kepala sekolah sebagai pimpinan tertinggi di sekolah memiliki fungsi manajemen sebagai pengawas. Kegiatan fungsi manajemen dalam pengawasan dilakukan melalui supervisi, yang bertujuan untuk mengoreksi, meninjau, dan menilai kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisi ini juga bertujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas guru, sehingga dapat mendukung fokus pengembangan peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. Pelaksanaan supervisi dilakukan dengan memperhatikan prinsip objektivitas untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam setiap tindakannya.

Analisis SWOT implementasi Manajemen Kurikulum 2013

a. **Kekuatan (*Strengths*)**

1) Sumber daya manusia.

Kekuatan pendidik dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terletak pada sifat inovatif dan kreatifnya, baik dalam kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga dilakukan melalui berbagai praktik yang diterapkan secara langsung.

2) Profil

Sekolah telah diakui dan terdaftar sebagai sekolah negeri yang terstandarisasi. Selain itu, pemerintah daerah telah mengeluarkan SK pendirian sekolah, dan sekolah tersebut juga terdaftar secara resmi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

3) Ketersedian Sarana dan prasarana

Pelaksanaan kegiatan didukung oleh sarana dan prasarana yang baik dan memadai, seperti bangunan dengan ruangan-ruangan yang dirancang untuk mendukung kegiatan pembelajaran.

4) Penggunaan Visi dan Misi Sekolah

Visi dan misi sekolah digunakan sebagai pedoman dalam proses pencapaian kegiatan pembelajaran. Isi visi dan misi tersebut menjadi acuan untuk menentukan langkah-langkah pengembangan pembelajaran bagi peserta didik.

5) Koordinasi dan Komunikasi

Koordinasi dan komunikasi yang dilakukan pihak sekolah dengan kepala sekolah kepada instansi pendidikan terkait yaitu, Kementrian Pendidikan sehingga menjadikan sebuah pemenuhan kebutuah dalam kegiatan aktivitas pembelajaran.

6) Pembelajaran

Dalam RPP memfokuskan pada pembelajaran yang dilaksanakan dari

kegiatan-kegiatan pembelajaran dengan nilai belajar dan nilai praktek sehingga menjadi kekuatan dalam menciptakan keberhasilan pembelajaran.

7) Penilaian Formatif dan Somatif

Peniaian kepada peserta didik digunakan sebagai sebuah kegiatan evaluasi, evaluasi digunakan dalam sekolah adalah 3 bulan sekali dan 1 tahun sekali yang diselanggarakan di sekolah yang sehingga ini menjadikan kekuatan untuk pengembangan yang sesuai dengan peserta didik di sekolah.

b. **Peluang (*Opportunities*)**

1) Pengorganisasian

Penggunaan peraturan dalam kegiatan pengorganisasiaan dengan peraturan pendidikan merupakan langkah implementasi kurikulum 2013 terkait sebuah kerangka dan standar kurikulum 2013, standar kelulusan, standar isi, standar proses pendidikan dan standar penilaian menjadikan sekolah sebagai bagian dari satu kesatuan dalam menyusukseskan pendidikan nasional untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar.

2) Muatan Kurikulum Lokal

Adanya muatan kurikulum lokal yang diberlakukan di sekolah untuk sekolah yang berada di Jakarta hal ini sebagai nilai tambah dalam pengembangan ketrampilan peserta didik di sekolah.

3) Pembinaan, Penataran dan Pengembangan

Kegiatan pembinaan, penataran dan pengembangan melalui kegiatan diklat, seminar dan bimtek sebagai sebuah pegangan guru dalam berkembang.

4) Nilai Belajar dan Nilai Praktek

Dalam kegiatan pengajaran terdapat nilai belajar dan nilai praktek sehingga memudahkan peserta didik mencapai ketuntasan belajar dengan peningkatan keberhasilan ranah sikap, pengetahuan dan ketrampilan.

5) Supervisi Akademik dan Klinis

Pengawasan dilakukan melalui supervisi akademik dan supervisi klinis. Supervisi akademik berfungsi sebagai media untuk menilai proses pembelajaran, yang dilakukan oleh kepala sekolah melalui peninjauan atau observasi sebagai bagian dari aktivitas pengawasan. Sementara itu, supervisi klinis digunakan oleh kepala sekolah untuk memperbaiki perilaku guru yang tidak sesuai, terutama jika terkait dengan tindakan yang merugikan peserta didik

c. **Kelemahan** (*Weakness*)

1) Tingkat Konsistensi Yang Rendah
2) Partisipasi Peserta Didik
3) Pengadaan Sumber Bahan Ajar

d. **Ancaman (*Threats)***

1) Tidak Maksimal dan Tingkat Konsistensi Rendah

Dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran guru terkadang tidak memperhatikan pengembangan dari aspek nilai praktek untuk sikap dalam pendidikan agama Islam dan kurangnya partisipasi dari peserta didik dalam mengikuti serangkain kegiatan nilai praktek yang sekolah terapkan.

2) Tidak Tersedianya Bahan Ajar

Buku dalam sebagai media pembelajaran di kelas yang digunakan oleh pihak guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran terkadang mengalami keterlambatan dan berbagai hambatan lainnya.

Solusi menghadapi hambatan implementasi manajemen kurikulum 2013

Berdasarkan hasil peneltian hambatan mengenai implementasi manajemen kurikulum 2013 yakni Beberapa guru masih melakukan penilaian secara tekstual, yang berfokus pada kemampuan dan kecerdasan peserta didik dalam menjawab soal-soal. Namun, penilaian tersebut kurang memperhatikan aspek perubahan dan perkembangan karakter, terutama terkait sikap dan budi pekerti yang menjadi fokus visi dan misi sekolah serta implementasi Kurikulum 2013. Selain itu, keterbatasan waktu yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas juga menjadi salah satu kendala. Sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi di sekolah, peneliti menawarkan beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu:

a. Melakukan rapat evaluasi terkait kegiatan proses pembelajaran yang sudah dilakukan untuk peserta didik pada guru dikelas.
b. Memberikan dan memaksimalkan supervisi akademik dan supervisi klinis sebagai penilaian guru.
c. Memaksimalkan kegiatan-kegiatan yang berfokus nilai praktek pada pengembangan karakter dan sikap pada peserta didik yang sekolah memiliki pencapaian bentuk aktivitas pencapaian tujuan pendidikan nasional kurikulum 2013.
d. Melaksanakan kegiatan diklat, bimtek atau seminar yang diadakan di sekolah maupun diluar sekolah.
e. Mendorong guru untuk selalu bersikap inovatif dan kreatif dalam mengembangan proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam melibatkan fungsi-fungsi manajemen yang mencakup:

1. Pada tahap perencanaan (*Planning*) dalam pengimplementasikan kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam yang dilakukan dengan cara merumuskan dan memberlakukan unsur kuantitatif sebagai tindakan untuk memperjelas profil sekolah mengenai jenis, jenjang dan jalur pendidikan kemudian melakukan tindakan penganggaran ekonomi sebagai pendukung kelengkapan sarana prasarana. Selanjutnya merumuskan dan menyiapkan unsur kualitatif dengan melakukan tindakan pembentukan atau perumusan visi dan misi yang mengandung nilai-nilai fokus pada pengimplementasian kurikulum 2013 serta menyiapkan sumber daya manusia yaitu, guru pendidikan agama Islam.
2. Pada tahap pengorganisasian (*organizing*) dalam pengimplementasian kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam tersusun berdasarkan tindakan koordinasi secara vertikal dan horizontal, antara kepala sekolah dengan pendidik dan tenaga pendidikan serta kepala sekolah dengan para lembaga pemerintah terkait. Kemudian dilengkapi dengan struktur organisasi secara fungsional di sekolah sehingga semua tugas, wewenang dan tanggungjawab terarah dan tersistematis untuk menjalankan dan mengimplementasikan kurikulum 2013 padapendidikan agama Islam. Selanjutnya dilengkapi dengan regulasi tahap pemakaian segala macam peraturan dan ketentuan terkait impelementasi kurikulum 2013.

3. Pada tahap pelaksanaan (*Actuating*) dalam pengimplementasian kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam dapat dilihat dengan memperhatikan input pendidikan seperti guru, kepala sekolah, tenaga kependidikan, serta peserta didik. Dalam hal fungsi pelaksanaan guru melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan agama Islam yang mencangkup nilai belajar dengan pengajaran aqidah, pengajaran akhlak, pengajaran ibadah, pengajaran Al-Quran, pengajaran fikih dan pengajaran sejarah Islam, serta tidak lupa disandingkan nilai praktek seperti misalnya, mengucapkan salam, sholat berjamaah dan membaca Al-Quran. Serangkaian aktivitas pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Islam harus memiliki hasil secara kognitif, afektif dan psikomotorik yang berguna untuk di masyarakat, di rumah dan di sekolah.
4. Pada tahap pengawasan (*Controlling*) dalam pengimplementasian kurikulum 2013 pada pendidikan agama Islam dilakukan oleh kepala sekolah sebagai pelaku pengawasan. Dalam hal proses pengawasan kepala sekolah memberlakukan supervisi akademik, sebagai standar kepala sekolah melakukan penilaian berdasarkan observasi dan peninjauan yang dilakukan kepada individu personal guru di dalam pembelajaran. Yang kemudian digunakan sebagai acuan peningkatan dan evaluasi individu personal guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya juga memberlakukan supervisi klinis jika adanya penyimpangan karakter atau sifat pribadi guru dalam melakukan kegiatan pembalajaran. Supervisi klinis sebagai upaya dalam rangka melakukan perbaikan penyimpangan yang dilakukan guru kepada peserta didik

DAFTAR REFERENSI

Abidin, Z. (1975). *Konsepsi Negara Bermoral.* Jakarta: Bulan Bintang.

BPS. (2020, Januari). *IPM indonesia pada tahun 2019*. Retrieved from www.bps.go.id/pressrelease/indeksp-pembangunan-manusia-ipm-indonesia-pada-tahun-2019-mencapat-71-92.html, Diakses pada 28 Januari 2020.

Hartati, I. N. (2020). Metodologi Penelitian Sosial. surabaya: Media Sahabat Cendikia.

J.R, R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kasmawati. (2019). "Implementasi Perencanaan Pendidikan Dalam Lembaga Pendidikan Islam" . *Jurnal Idaarah*, Vol. III, No.1.hal 41.

KPAI. (n.d.). *sejumlah kasus bullying sudah warnai catatan masalah anak di awal 2020*. Retrieved from Tim KPAI, KPAI: Sejumlah Kasus Bullying Sudah Warnai Catatan Masalah Anak di Awal Tahun 2020, Media: kpai.go.id, Dirilis pada 10 Februari 2020, atau https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begin

Laliatussadah. (2015). Upaya Peningkatan Kinerja Guru. *Jurnal Intelektualita*, 15-16.

Safrudianur, L. S. (2014). Implementasi Kurikulum 2013 Pada Jenjang Pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Kalimantan Timur Tahun 2013-2014. *Jurnal Pancaran, Vol.3, No.4*, 131-132.

Shunhaji, A. (2019). Agama dalam Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar, dalam Andragogi. *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No.1, hal 6.

Sugiyono. (2019). Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. Bandung: ALFABETA.

Suhana, N. H. (2009). *Konsep Strategi Pembelajaran.* Bandung: Rafika Aditama.

Unesco. (2000). *Treasure Within: Report to UNESCO of The International Commission Education for the Twenty-First Century,.* France: Unesco Publishing.

Wijdan, M. U. (1997). *Pendidikan Islam dalam Peradaban Industria.* Yogyakarta: Aditya Media.